Nama Lengkap :

NIP :  
Jabatan :

Instansi :

Rangkuman

**Agenda 1 - Sikap Perilaku Bela Negara**

**Agenda 1 – Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara**

Materi ini membahas secara mendalam mengenai pentingnya sikap dan perilaku bela negara yang wajib dimiliki oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai wujud nyata pengabdian dan tanggung jawab moral kepada bangsa dan negara. Konsep bela negara tidak hanya menjadi tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI), tetapi merupakan kewajiban kolektif seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dalam konteks ASN, peran bela negara diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar bangsa dalam setiap aspek pekerjaan dan pengabdian kepada masyarakat.

Bela negara mencakup beberapa dimensi penting, yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air, menanamkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menjaga kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, serta memupuk kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. ASN juga dituntut untuk memiliki kemampuan awal bela negara, yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas diri, penguasaan teknologi, kemampuan literasi informasi, dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai bentuk ancaman.

Dalam materi ini, dijelaskan pula bahwa di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, berbagai ancaman kontemporer semakin beragam dan tidak selalu bersifat militer. Ancaman-ancaman tersebut meliputi penyebaran paham radikalisme, aksi terorisme, intoleransi yang memecah belah kerukunan, potensi disintegrasi bangsa, penyebaran berita hoaks dan disinformasi, proxy war atau perang melalui pihak ketiga, hingga pengaruh budaya asing yang dapat melemahkan identitas nasional. Oleh karena itu, ASN harus memiliki kepekaan, kecermatan, serta sikap tanggap dan waspada agar dapat menjadi benteng pertahanan bangsa dalam menghadapi ancaman-ancaman tersebut.

Selain itu, materi ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan, serta tetap menjaga keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan berlandaskan empat konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara yang harus dijaga keutuhannya, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang mencerminkan kemajemukan bangsa yang tetap satu.

ASN diharapkan benar-benar menginternalisasi empat konsensus tersebut dalam setiap tindakan, keputusan, maupun sikap kerja sehari-hari, agar tetap konsisten menjadi teladan bagi masyarakat. Dengan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, ASN diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta mampu berkontribusi aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif di lingkungan kerja maupun di masyarakat.

Kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan ini menjadi bekal penting bagi ASN untuk menjalankan peran sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI di tengah era modern yang penuh tantangan. ASN bukan hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai pelopor dalam menjaga stabilitas nasional, perekat persatuan, serta penggerak nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sosial. Dengan demikian, materi ini secara keseluruhan menegaskan bahwa sikap dan perilaku bela negara harus senantiasa ditumbuhkan, dipelihara, dan diwujudkan melalui pengabdian ASN yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan.

**Agenda 1 – Analisis Isu Kontemporer**

Materi Analisis Isu Kontemporer membahas secara komprehensif bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kepekaan, pengetahuan, dan kemampuan berpikir kritis dalam memahami, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai persoalan aktual yang muncul dan berkembang di masyarakat, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Dalam era globalisasi yang diwarnai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, dinamika permasalahan sosial semakin kompleks, cepat berubah, dan seringkali tidak terduga. Oleh karena itu, ASN diharapkan tidak hanya menjalankan tugas administratif semata, tetapi juga mampu bertindak sebagai agen perubahan sosial yang memiliki daya analisis tinggi dan respons yang tepat.

Isu-isu kontemporer yang sering kali muncul dan menjadi tantangan bagi ASN antara lain radikalisme, terorisme, intoleransi, konflik horizontal antar kelompok masyarakat, potensi disintegrasi bangsa, penyebaran hoaks dan disinformasi melalui media sosial, serta pengaruh globalisasi yang dapat memengaruhi pola pikir, budaya, hingga perilaku masyarakat. Isu-isu ini bila tidak diantisipasi dengan baik berpotensi merusak persatuan, menurunkan ketahanan nasional, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

ASN dituntut untuk memiliki kemampuan menggali akar persoalan di balik setiap isu yang muncul, memahami aktor-aktor yang terlibat, menganalisis dampaknya secara jangka pendek dan jangka panjang, serta mampu merumuskan alternatif solusi yang bijak, cepat, tepat sasaran, dan berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks ini, ASN harus menguasai keterampilan literasi digital, karena sebagian besar penyebaran isu kontemporer terjadi melalui ruang digital. Literasi digital membantu ASN memilah informasi valid, menangkal hoaks, mendeteksi propaganda, serta mencegah penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa.

Selain itu, ASN juga perlu membangun sikap kritis, tanggap, serta kemampuan berpikir analitis dan sistematis dalam setiap pengambilan keputusan. ASN diharapkan tidak bersikap pasif atau hanya menunggu instruksi atasan, melainkan proaktif menginisiasi langkah-langkah pencegahan dan penanganan isu yang berkembang di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Sikap partisipatif ini menjadi bukti nyata bahwa ASN benar-benar berperan sebagai perekat persatuan bangsa di tingkat akar rumput.

Materi ini juga mengingatkan bahwa era disrupsi teknologi membawa tantangan baru di mana isu kontemporer dapat berkembang begitu cepat melalui ekosistem digital yang sulit dibatasi. Oleh karena itu, ASN perlu terus meningkatkan kapasitas diri melalui pelatihan, diskusi, maupun pertukaran pengetahuan, agar dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjawab tuntutan masyarakat secara profesional. ASN juga perlu membangun jejaring kerja sama lintas instansi, komunitas, bahkan lintas sektor, sehingga penanganan isu bisa dilakukan secara kolaboratif dan menyeluruh.

Pada akhirnya, kemampuan menganalisis isu kontemporer adalah salah satu kompetensi strategis bagi ASN modern untuk mendukung profesionalitas, netralitas, serta menjaga integritas sebagai abdi negara. ASN yang memiliki daya analisis tajam dan berpikir solutif akan mampu berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat ketahanan bangsa, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adaptif, dan berkelas dunia. Dengan demikian, materi ini menjadi pengingat penting bagi seluruh ASN untuk tidak lengah terhadap isu-isu aktual, tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya dalam menghadapi dinamika perubahan zaman.

**Agenda 1 – Kesiapsiagaan Bela Negara**

Materi Kesiapsiagaan Bela Negara menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab moral, etis, dan konstitusional untuk senantiasa siap membela negara dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun non-militer. Kesiapsiagaan ini menjadi salah satu komitmen kebangsaan yang harus ditanamkan sejak dini, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, sekaligus perekat persatuan bangsa.

Dalam konteks tugas sehari-hari, kesiapsiagaan bela negara bukan hanya diartikan sebagai kesiapan fisik menghadapi ancaman bersenjata, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, sigap dalam bertindak, serta peka membaca situasi yang berpotensi melemahkan kedaulatan negara. Materi ini menegaskan bahwa ASN sebagai garda terdepan di birokrasi harus memiliki pemahaman mendalam mengenai pentingnya mempertahankan keutuhan wilayah, kedaulatan politik, serta keselamatan segenap bangsa Indonesia di tengah tantangan global yang dinamis.

Konsep kesiapsiagaan bela negara di era modern menuntut ASN untuk memiliki ketahanan diri yang kuat, tidak mudah terpengaruh oleh hasutan, provokasi, maupun informasi menyesatkan yang marak tersebar di era digital. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penting yang harus dimiliki ASN agar tidak gagap teknologi, sekaligus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi potensi ancaman sejak dini. Literasi digital juga menjadi kunci untuk menangkal propaganda, berita hoaks, radikalisme, hingga upaya disintegrasi bangsa yang seringkali menyusup melalui berbagai kanal komunikasi digital.

Lebih dari itu, kesiapsiagaan bela negara juga menuntut ASN untuk memiliki kepekaan sosial dan kemampuan membangun jejaring kerja sama lintas sektor serta lintas instansi. Hal ini penting agar deteksi dini potensi ancaman bisa dilakukan secara kolektif, dengan pola koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut menjadi upaya konkret untuk mencegah, menanggulangi, sekaligus memitigasi dampak berbagai ancaman non-militer yang dapat mengganggu stabilitas nasional.

ASN juga diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan kerja maupun di masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai nasionalisme, kebersamaan, toleransi, dan gotong royong. Kesadaran bela negara yang terintegrasi dengan tugas ASN sebagai pelayan publik akan menumbuhkan sikap disiplin, loyalitas pada NKRI, serta kepekaan sosial dalam menghadapi berbagai permasalahan di masyarakat. ASN yang memiliki kesiapsiagaan bela negara tidak hanya siap menghadapi tantangan fisik, tetapi juga tangguh secara mental, emosional, dan spiritual.

Pada intinya, materi ini menggarisbawahi bahwa kesiapsiagaan bela negara bukanlah suatu hal yang statis, melainkan harus terus diperkuat melalui pembelajaran berkelanjutan, latihan kemampuan deteksi dini, serta penanaman nilai-nilai kebangsaan dalam setiap pelaksanaan tugas ASN. Dengan demikian, karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan dapat terwujud, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan era globalisasi dan digitalisasi tanpa kehilangan jati diri sebagai abdi negara yang setia kepada Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai pengingat, ASN yang memiliki kesiapsiagaan bela negara diharapkan dapat menjadi perekat sekaligus penggerak semangat bela negara di lingkungannya, baik di instansi pemerintahan maupun di masyarakat luas. Tanggung jawab membela negara harus dilaksanakan tidak hanya dalam situasi darurat, tetapi juga melalui pengabdian sehari-hari dengan menunjukkan dedikasi, loyalitas, serta kinerja terbaik untuk mendukung tercapainya cita-cita nasional: Indonesia yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan berdaulat di panggung dunia.

**Agenda 2 – Nilai-Nilai Dasar ASN**

**Agenda 2 – Berorientasi Pelayanan**

Materi Berorientasi Pelayanan menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelayan publik harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pelayanan publik yang diberikan ASN harus mencerminkan kualitas prima, yaitu pelayanan yang bermutu, mudah diakses, cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Pelayanan yang baik tidak hanya berdampak pada kepuasan masyarakat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara.

ASN diharapkan mampu memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam, mendengarkan keluhan, merespons aspirasi, serta proaktif dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan publik. Prinsip pelayanan prima juga diwujudkan melalui sikap yang ramah, santun, sopan, sigap, tepat waktu, tidak diskriminatif, serta senantiasa menjaga integritas dalam melayani siapa pun, tanpa memandang status sosial, agama, ras, maupun golongan. ASN harus menjadi figur yang bisa diandalkan masyarakat kapan saja.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan era digitalisasi, pelayanan publik juga dituntut untuk bertransformasi dan berinovasi agar semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Digitalisasi layanan publik merupakan salah satu bentuk adaptasi untuk menjawab tantangan masyarakat yang menginginkan layanan cepat, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang teknologi informasi, komunikasi, literasi digital, hingga keamanan data agar layanan publik tetap optimal.

Selain itu, penguasaan keterampilan komunikasi yang baik menjadi modal penting bagi ASN untuk menciptakan komunikasi yang efektif, membangun kepercayaan, serta meredam potensi konflik di lapangan. Empati juga menjadi unsur yang sangat penting agar ASN dapat merasakan apa yang dirasakan masyarakat, sehingga mampu memberikan pelayanan yang manusiawi, solutif, dan tepat sasaran.

Materi ini menekankan bahwa pelayanan publik yang prima adalah cerminan birokrasi modern yang berkelas dunia, di mana setiap proses kerja diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Budaya kerja BerAKHLAK, khususnya nilai Berorientasi Pelayanan, harus benar-benar diinternalisasi dan diimplementasikan dalam setiap pelaksanaan tugas. Dengan menjadikan pelayanan publik sebagai orientasi utama, ASN dapat menjadi motor penggerak terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pelayanan yang baik juga berarti pelayanan yang berkelanjutan. ASN tidak boleh berhenti pada satu pola layanan, tetapi harus selalu terbuka pada evaluasi, perbaikan, dan inovasi. Budaya kerja yang adaptif akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, dan mampu menjawab tuntutan perubahan di masyarakat yang kian kompleks.

Dengan menempatkan pelayanan sebagai jantung kerja birokrasi, diharapkan tercapai tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta mewujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Pelayanan publik yang prima pada akhirnya akan menciptakan citra ASN yang profesional, berintegritas, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat sebagai wujud nyata pengabdian kepada bangsa dan negara.

**Agenda 2 – Akuntabel**

Materi Akuntabel menjelaskan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki tanggung jawab moral, etis, dan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, dan hasil kerja yang dilakukan dalam rangka melayani masyarakat serta menjalankan fungsi pemerintahan. Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, berwibawa, dan bebas dari penyimpangan.

Sikap akuntabel menuntut setiap ASN untuk bekerja secara profesional, menaati standar operasional prosedur (SOP), berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas. Akuntabilitas bukan hanya soal memberikan laporan hasil akhir, tetapi juga meliputi kejelasan prosedur, transparansi proses kerja, serta pelaporan yang jelas, tepat waktu, dan dapat diverifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini menjadi bukti bahwa setiap kebijakan atau kegiatan benar-benar dilaksanakan sesuai rencana, anggaran, dan tujuan.

Dalam praktiknya, ASN yang berakuntabilitas tinggi akan bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, teliti, jujur, dan tidak akan pernah memanfaatkan celah untuk menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu. ASN harus mampu menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan bersifat objektif, dapat diukur, dapat diaudit, dan terbuka untuk dievaluasi. Hal ini sejalan dengan semangat transparansi publik agar masyarakat dapat menilai seberapa baik kinerja lembaga pemerintahan.

Materi ini juga menekankan pentingnya ASN memiliki pengendalian diri yang kuat agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang menjadi sumber kerusakan birokrasi. ASN yang akuntabel tidak hanya sekadar bekerja sesuai target, tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses kerja bersih dari praktik-praktik penyimpangan, manipulasi, atau pemalsuan data.

Selain itu, sikap akuntabel harus tercermin dalam laporan kinerja yang disusun secara terstruktur, dilengkapi dengan bukti pendukung yang valid, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada atasan, auditor internal, maupun publik. Dengan begitu, budaya kerja akuntabel tidak hanya memperkuat reputasi pribadi ASN, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Dalam skala organisasi, akuntabilitas akan mendorong terciptanya good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini akan memperkuat integritas birokrasi, meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sebagai penutup, materi ini menegaskan bahwa nilai Akuntabel harus diinternalisasi oleh setiap ASN sebagai bagian dari nilai dasar BerAKHLAK, agar dapat diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Dengan budaya kerja yang akuntabel, ASN tidak hanya diakui profesional secara individu, tetapi juga berkontribusi nyata dalam membangun birokrasi modern yang bersih, transparan, dan berdaya saing global. Dengan demikian, cita-cita reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan Indonesia maju dapat tercapai dengan dukungan ASN yang benar-benar dapat dipercaya.

**Agenda 2 – Humoris**

Materi Harmonis menekankan betapa pentingnya sikap saling menghargai, saling peduli, dan membangun kerja sama yang baik di lingkungan kerja, terutama di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari nilai dasar BerAKHLAK, nilai harmonis menjadi fondasi agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) mampu menjaga suasana kerja yang rukun, tenteram, dan produktif meskipun diwarnai oleh perbedaan latar belakang suku, agama, ras, budaya, maupun pandangan.

ASN dituntut untuk selalu mengutamakan sikap toleransi, saling memahami satu sama lain, serta menghindari perilaku diskriminatif dan intoleran yang dapat memicu konflik internal. Saling menghargai pendapat, terbuka pada masukan, dan menghormati keragaman ide adalah cara menjaga hubungan kerja yang sehat. Dengan lingkungan kerja yang harmonis, setiap ASN dapat berkolaborasi secara optimal, saling mendukung, saling mengisi kekurangan, dan mendorong terciptanya inovasi demi pelayanan publik yang lebih baik.

Materi ini juga menggarisbawahi pentingnya kemampuan berkomunikasi yang efektif agar potensi konflik dapat dicegah sejak dini. Jika terjadi perbedaan pendapat atau ketegangan, ASN harus mampu menyelesaikannya dengan bijak, mengutamakan musyawarah, dan menghindari sikap keras kepala atau egois. Dengan begitu, potensi perpecahan dapat dihindari, dan suasana kerja yang kondusif tetap terjaga.

Selain dalam hubungan antarrekan kerja, sikap harmonis harus diwujudkan dalam pelayanan kepada masyarakat. ASN diharapkan dapat menjadi teladan bagi publik dengan perilaku yang santun, empatik, dan penuh rasa hormat pada siapa pun yang dilayani. Pelayanan publik yang dilandasi nilai harmonis akan menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini penting karena kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat berharga dalam pembangunan.

Materi ini juga mengingatkan bahwa budaya kerja harmonis turut mendukung lingkungan kerja inklusif, di mana setiap pegawai merasa aman, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Lingkungan kerja yang harmonis akan meningkatkan semangat kerja sama tim, mempererat solidaritas, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap organisasi.

Lebih jauh lagi, sikap harmonis tidak hanya berdampak pada hubungan internal, tetapi juga pada ketahanan sosial di masyarakat. ASN yang harmonis di lingkungan kerja akan terbiasa menularkan semangat kerukunan di lingkup yang lebih luas. ASN menjadi contoh nyata bagaimana keragaman dapat diikat dalam semangat persatuan dan kesatuan.

Pada akhirnya, nilai harmonis menjadi pondasi penting bagi ASN dalam mewujudkan birokrasi yang humanis, inklusif, dan mendukung terciptanya suasana kerja yang sejuk serta pelayanan publik yang bermartabat. Dengan mempraktikkan sikap harmonis secara konsisten, ASN berkontribusi aktif dalam menjaga persatuan bangsa dan menjadi perekat sosial di tengah masyarakat yang multikultural.

**Agenda 2 – Loyal**

Materi Loyal menekankan bahwa kesetiaan dan kepatuhan adalah sikap mendasar yang harus dipegang teguh oleh setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, abdi negara, dan perekat persatuan bangsa. Nilai loyalitas bukan hanya sekadar mengikuti perintah atasan, melainkan wujud nyata dari komitmen ASN untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mendukung pemerintahan yang sah berdasarkan konstitusi.

Seorang ASN yang memiliki loyalitas tinggi akan selalu siap mendukung dan menjalankan segala kebijakan dan program pemerintah secara konsisten, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, dinamika politik, maupun perubahan regulasi. ASN yang loyal tidak mudah goyah oleh pengaruh eksternal yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Hal ini menjadi modal penting bagi ASN agar tetap fokus pada tujuan utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Materi ini juga menegaskan bahwa loyalitas mencakup sikap setia kepada pimpinan, rekan kerja, dan lembaga, dengan tetap berpegang pada prinsip integritas dan etika profesi. ASN harus mampu menjaga rahasia jabatan yang bersifat strategis, menghindari konflik kepentingan, dan tidak melakukan tindakan yang dapat mencoreng citra lembaga. Dengan demikian, setiap informasi yang bersifat internal tetap aman dan tidak disalahgunakan pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam konteks hubungan dengan masyarakat, loyalitas ASN tercermin melalui sikap netral dalam menghadapi setiap dinamika politik. ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis atau mendukung kepentingan politik tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip netralitas ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, guna memastikan pelayanan publik diberikan secara adil, objektif, profesional, dan tidak diskriminatif.

Materi ini juga menjelaskan bahwa sikap loyal harus berjalan seiring dengan keberanian ASN untuk memberikan masukan yang konstruktif kepada pimpinan demi perbaikan kinerja birokrasi. Loyal bukan berarti membenarkan tindakan yang salah, melainkan mampu menjaga kepercayaan dengan cara memberikan dukungan yang tulus serta kritik yang membangun ketika diperlukan. Dengan cara ini, ASN tetap menjunjung tinggi good governance dan mencegah terjadinya praktik-praktik maladministrasi.

Loyalitas yang kokoh akan membuat ASN berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan seperti potensi disintegrasi, intoleransi, dan konflik horizontal. ASN yang loyal akan menjadi teladan dalam menjaga stabilitas, merawat kerukunan, dan memastikan roda pemerintahan berjalan sesuai arah kebijakan negara.

Pada akhirnya, dengan memegang nilai loyal, ASN diharapkan mampu menjadi abdi negara yang tangguh, setia, dan siap mendukung terwujudnya tujuan nasional, yaitu masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan tetap teguh dalam bingkai NKRI. Kesetiaan ASN bukan hanya komitmen individu, tetapi juga kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan kemajuan bangsa di era globalisasi yang penuh tantangan.

**Agenda 2 – Adaptif**

Materi Adaptif menjelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, tepat, dan bijak terhadap setiap perubahan, baik di lingkungan kerja internal maupun eksternal. Nilai adaptif adalah salah satu nilai fundamental dalam BerAKHLAK, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku ASN agar tetap profesional, relevan, dan tangguh di tengah dinamika zaman yang penuh ketidakpastian.

Dalam dunia birokrasi modern, ASN adaptif bukan hanya dituntut untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan atau prosedur kerja, tetapi juga mampu membaca tren dan tantangan global seperti digitalisasi, transformasi teknologi, perubahan sosial-budaya, hingga pergeseran pola pelayanan publik. ASN yang adaptif tidak gagap teknologi, melainkan proaktif memanfaatkan inovasi digital sebagai sarana meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas layanan kepada masyarakat.

Sikap adaptif juga tercermin dari kemauan untuk belajar sepanjang hayat (lifelong learning). ASN yang adaptif senantiasa membuka diri terhadap pengetahuan baru, menyerap praktik-praktik terbaik (best practices), serta mau berinovasi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Mereka mampu mengidentifikasi peluang dari setiap perubahan dan menjadikannya sebagai momentum untuk mendorong reformasi birokrasi.

Materi ini menegaskan bahwa ASN adaptif tidak mudah menyerah ketika menghadapi kendala atau hambatan dalam bekerja. Sebaliknya, mereka berpikir kreatif, fleksibel, dan solutif, sehingga mampu menemukan alternatif cara kerja yang lebih efektif dan efisien. Karakter ini sangat diperlukan agar birokrasi tetap lincah, responsif, serta tidak terjebak dalam pola kerja yang kaku dan usang.

Selain itu, sikap adaptif juga menuntut ASN untuk mampu bekerja lintas disiplin, lintas generasi, dan lintas sektor, karena tantangan pelayanan publik kini semakin kompleks. ASN harus bisa membangun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, memanfaatkan kemajuan teknologi, dan memahami preferensi masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, pelayanan publik dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Dalam implementasinya, ASN adaptif akan menjadi agen perubahan (change agent) yang dapat menginspirasi rekan kerja, mendorong budaya kerja inovatif, serta memperkuat daya saing birokrasi Indonesia di kancah global. Mereka juga akan lebih siap menghadapi krisis atau situasi darurat, karena memiliki pola pikir terbuka dan kemampuan berpikir kritis untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Pada akhirnya, nilai adaptif tidak hanya membentuk ASN yang siap menghadapi disrupsi teknologi dan tantangan globalisasi, tetapi juga mendukung terwujudnya birokrasi modern yang agile, lincah, dan berdampak positif bagi masyarakat luas. Sikap adaptif menjadi bekal penting bagi ASN untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, yakni Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur di tengah persaingan dunia yang semakin kompetitif.

**Agenda 2 – Kolaboratif**

Materi Kolaboratif menekankan pentingnya sikap dan perilaku bekerja sama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan, dan perekat persatuan bangsa. Kolaborasi menjadi salah satu nilai utama dalam BerAKHLAK, yang wajib diinternalisasi setiap ASN agar mampu menjawab tantangan birokrasi modern yang semakin kompleks.

ASN yang kolaboratif tidak hanya bekerja dalam ruang lingkup sempit unit kerjanya sendiri, tetapi juga mampu menjalin kerja sama lintas bidang, lintas instansi, lintas sektor, bahkan lintas masyarakat. Hal ini penting mengingat banyak persoalan di pemerintahan bersifat multidimensional dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan sektoral atau individual semata.

Dalam konteks kerja kolaboratif, ASN dituntut untuk mampu membuka diri, menghargai perbedaan pendapat, mendengarkan masukan dari berbagai pihak, serta membangun saling pengertian dan kepercayaan. ASN juga perlu proaktif berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya demi terwujudnya tujuan bersama. Nilai ini mendorong lahirnya sinergi yang memperkuat kinerja organisasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Selain di internal birokrasi, kolaborasi juga perlu diperluas dengan pihak eksternal, seperti sektor swasta, akademisi, komunitas masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama lintas sektor ini penting untuk memadukan sumber daya, memperkaya perspektif, dan mendorong inovasi dalam menyelesaikan masalah publik yang kompleks. Melalui kemitraan yang inklusif, diharapkan tercipta solusi yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan membawa manfaat luas.

Materi ini juga menekankan bahwa sikap kolaboratif adalah wujud nyata dari semangat gotong royong, yang merupakan nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan menumbuhkan semangat gotong royong di lingkungan birokrasi, ASN menjadi motor penggerak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif, partisipatif, responsif, dan adaptif. Hal ini juga mendukung upaya reformasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia.

Dalam praktik sehari-hari, ASN kolaboratif harus mampu membangun jejaring kerja yang kuat, menciptakan suasana kerja yang harmonis, dan menjaga komunikasi yang efektif agar koordinasi berjalan lancar. Kolaborasi bukan sekadar kerja sama administratif, tetapi juga dibangun di atas fondasi kepercayaan, komitmen bersama, serta tanggung jawab kolektif untuk mencapai hasil terbaik bagi masyarakat.

Dengan nilai kolaboratif yang kuat, ASN akan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan, mampu menangani tantangan lintas sektor, serta meningkatkan kualitas kebijakan dan layanan publik. Kolaborasi efektif juga mempercepat pencapaian target pembangunan nasional karena setiap pihak bergerak dalam visi yang sama, saling menguatkan, dan mengisi kekosongan satu sama lain.

Pada akhirnya, ASN kolaboratif adalah wujud ASN masa depan yang tidak bekerja secara eksklusif, melainkan terbuka, saling terhubung, dan sinergis, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan birokrasi modern yang tangguh, berdaya saing, dan dipercaya publik. Nilai kolaboratif inilah yang mendukung terwujudnya Indonesia maju, adil, makmur, dan sejahtera.

**Agenda 3 – Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI**

**Agenda 3 – SMART ASN**

Materi SMART ASN memaparkan konsep dan arah pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia agar mampu menjawab tuntutan perubahan zaman, dinamika sosial, serta tantangan birokrasi modern yang semakin kompleks dan dinamis. SMART ASN adalah gambaran ideal profil ASN masa depan yang dirumuskan melalui karakteristik S-M-A-R-T, yaitu: Smart (cerdas), Melayani (berorientasi pelayanan), Akuntabel (bertanggung jawab), Responsif (tanggap), dan Transformatif (agen perubahan).

Seorang ASN yang Smart dituntut untuk tidak hanya sekadar pintar dalam penguasaan kompetensi teknis sesuai bidang kerjanya, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional, sosial, dan digital. ASN harus mampu berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi masalah, serta dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja yang efektif, efisien, dan inovatif. ASN cerdas adalah ASN yang selalu haus akan pengetahuan, mau belajar, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital pemerintahan.

Karakteristik Melayani menekankan bahwa ASN harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. ASN harus mampu memberikan layanan publik yang prima, mudah diakses, cepat, tepat, transparan, humanis, dan berkeadilan. Orientasi pelayanan menuntut ASN bersikap ramah, responsif terhadap kebutuhan dan keluhan masyarakat, serta proaktif dalam mencari solusi. Melayani juga berarti berkomitmen menjaga kepuasan publik sebagai indikator utama keberhasilan birokrasi.

Karakteristik Akuntabel berarti setiap tindakan, keputusan, dan hasil kerja ASN harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas ASN tercermin dari integritas tinggi, kejujuran, disiplin, serta konsistensi antara perkataan dan perbuatan. ASN akuntabel tidak hanya transparan dalam pelaporan, tetapi juga membangun kepercayaan publik dengan tidak terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Dengan demikian, akuntabilitas mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat.

Sikap Responsif menjadi tuntutan bagi ASN untuk selalu peka, sigap, dan tanggap terhadap perubahan situasi, dinamika kebijakan, perkembangan teknologi, serta kebutuhan publik yang terus berkembang. ASN yang responsif mampu memberikan solusi cepat dan tepat dalam menghadapi masalah, serta berani berinovasi dalam tata kelola pemerintahan. Responsivitas juga mencakup kemampuan ASN untuk beradaptasi dengan regulasi baru dan perkembangan global yang berdampak pada pelayanan publik.

Karakteristik terakhir, Transformatif, menempatkan ASN sebagai agen perubahan yang mampu mendorong terjadinya transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern, adaptif, inklusif, dan berkelas dunia. ASN transformatif tidak hanya menunggu perintah, tetapi aktif menggagas pembaruan, membangun budaya kerja inovatif, serta memimpin perubahan positif di lingkungan kerjanya. ASN transformatif juga diharapkan mampu membangun kolaborasi lintas sektor, lintas generasi, dan lintas teknologi untuk menghadapi tantangan globalisasi.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai SMART ASN, diharapkan seluruh ASN Indonesia dapat tumbuh menjadi SDM unggul yang profesional, netral, berintegritas, dan memiliki daya saing tinggi di kancah global. Konsep SMART ASN sejalan dengan visi Indonesia Maju, di mana birokrasi harus menjadi mesin penggerak pembangunan nasional melalui pelayanan publik yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta inovasi yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, SMART ASN bukan sekadar jargon, tetapi menjadi panduan transformasi sikap, perilaku, pola pikir, dan budaya kerja ASN agar lebih siap menghadapi tantangan era disrupsi digital dan globalisasi. ASN SMART diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga inspirasi perubahan, motor pembangunan, dan perekat persatuan bangsa demi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan Indonesia yang maju, adil, makmur, serta sejahtera.

**Agenda 3 – Manajemen ASN**

Materi Manajemen ASN menjelaskan secara mendalam bagaimana pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia diatur secara sistematis dan terintegrasi agar dapat menghasilkan ASN yang profesional, netral, berintegritas, dan mampu melaksanakan tugas pemerintahan secara efektif, efisien, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kerangka pengelolaan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjadi landasan hukum pelaksanaan manajemen ASN di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Undang-Undang ini lahir sebagai bagian penting dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia yang menekankan penguatan sistem merit dalam manajemen SDM aparatur.

Secara umum, Manajemen ASN meliputi beberapa fungsi utama, yaitu: perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, pengelolaan kinerja, penggajian dan penghargaan, hingga pemberhentian. Setiap fungsi memiliki tujuan strategis dalam mendukung pembentukan ASN yang berkualitas dan berdaya saing.

Perencanaan kebutuhan ASN bertujuan agar setiap instansi memiliki jumlah pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan tantangan tugas ke depan. Penyusunan kebutuhan harus mempertimbangkan analisis jabatan, analisis beban kerja, proyeksi kebutuhan masa depan, serta sebaran ASN yang merata sesuai kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan terjadi keseimbangan antara jumlah, kompetensi, dan distribusi ASN, sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pegawai di unit kerja tertentu.

Pengadaan ASN dilaksanakan melalui proses rekrutmen yang transparan, objektif, kompetitif, bebas dari KKN, dan terbuka untuk semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. Proses seleksi ASN harus mampu menjaring individu yang memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang memadai, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN seperti integritas, netralitas, dan loyalitas pada NKRI.

Pengembangan karier ASN menjadi aspek penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas SDM aparatur secara berkelanjutan. Pengembangan dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, diklat manajerial, pelatihan kepemimpinan, pertukaran pengetahuan, serta penguatan kompetensi sosial kultural. ASN diharapkan terus belajar agar dapat menghadapi tuntutan zaman, inovasi teknologi, dan dinamika sosial yang cepat berubah. Dengan pengembangan karier yang terarah, ASN mampu bertransformasi menjadi motor perubahan birokrasi.

Pengelolaan kinerja ASN dilaksanakan untuk menjamin akuntabilitas, objektivitas, dan transparansi dalam penilaian kinerja setiap individu. Hasil penilaian menjadi dasar untuk pemberian penghargaan, promosi, mutasi, pembinaan, hingga pemberhentian jika tidak memenuhi standar kinerja. Penilaian kinerja juga harus mendukung budaya kerja yang produktif, kompetitif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Pada aspek penggajian dan penghargaan, manajemen ASN memastikan bahwa pegawai menerima haknya secara layak dan sesuai kinerja. Skema penggajian berbasis kinerja, tunjangan kinerja, hingga pemberian reward bagi ASN berprestasi menjadi bagian dari upaya memotivasi ASN untuk bekerja lebih profesional, jujur, dan bertanggung jawab.

Pemberhentian ASN dilakukan secara transparan dengan pertimbangan hukum, peraturan perundang-undangan, serta memperhatikan aspek keadilan. Pemberhentian dapat berupa pensiun, pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran disiplin berat, atau ketidakmampuan memenuhi target kinerja secara berkelanjutan.

Materi ini juga menekankan pentingnya penerapan sistem merit, yaitu kebijakan pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa diskriminasi ras, agama, gender, maupun golongan tertentu. Penerapan sistem merit mendukung terciptanya birokrasi yang bersih, netral, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, ASN wajib menjunjung tinggi prinsip netralitas, artinya ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis, harus fokus pada tugas melayani kepentingan publik, serta berpegang teguh pada Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Seiring perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin dinamis, materi Manajemen ASN juga menekankan pentingnya inovasi dalam tata kelola ASN. ASN harus adaptif terhadap teknologi digital, transformasi birokrasi, serta tren baru dalam pelayanan publik. Penguatan manajemen talenta juga menjadi strategi baru dalam membangun ASN yang unggul dan siap bersaing di tingkat global.

Dengan pengelolaan ASN yang profesional melalui manajemen ASN yang sistematis, adaptif, dan berorientasi pada kinerja, diharapkan terwujud birokrasi yang efektif, efisien, responsif, dan semakin berkelas dunia, mendukung visi Indonesia Maju melalui pelayanan publik yang bersih, melayani, akuntabel, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

**Keterkaitan Antar Agenda**

Keterkaitan antar Agenda 1, Agenda 2, dan Agenda 3 merupakan wujud dari kesatuan kerangka pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membentuk profil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi, berwawasan kebangsaan, serta mampu menjawab tantangan global yang dinamis. Ketiga agenda ini memiliki keterhubungan logis yang saling memperkuat satu sama lain, sehingga nilai-nilai yang ditanamkan tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam perilaku kerja ASN sehari-hari.

Agenda 1 berperan sebagai fondasi karakter ASN dengan menanamkan Sikap Perilaku Bela Negara, Wawasan Kebangsaan, Analisis Isu Kontemporer, hingga Kesiapsiagaan. Materi-materi di Agenda 1 memupuk kesadaran kolektif bahwa ASN adalah garda terdepan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus sebagai perekat persatuan bangsa di tengah tantangan zaman, mulai dari radikalisme, intoleransi, penyebaran hoaks, hingga ancaman disintegrasi yang semakin kompleks di era digital. Agenda ini membangun mindset dan jati diri ASN agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, siap mendeteksi ancaman, serta tanggap menghadapi dinamika globalisasi dan transformasi teknologi.

Selanjutnya, Agenda 2 hadir sebagai penjabaran operasional dari pondasi sikap yang sudah ditanamkan melalui Nilai-Nilai Dasar ASN, yaitu BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini memberikan pedoman konkrit bagi ASN dalam bertindak, berinteraksi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sikap bela negara yang diajarkan di Agenda 1 diwujudkan melalui praktik kerja yang mengutamakan kepentingan publik, akuntabilitas, profesionalitas, sikap toleransi, kesetiaan pada konstitusi, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, hingga kolaborasi lintas sektor. Agenda 2 dengan BerAKHLAK ini memastikan nilai-nilai luhur tidak sekadar slogan, melainkan tertanam dalam perilaku kerja ASN di berbagai lini birokrasi.

Agenda 3 kemudian memperkuat dan melembagakan semua nilai tersebut melalui materi Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI, SMART ASN, dan Manajemen ASN. Agenda ini menekankan pentingnya kerangka sistem manajemen ASN yang profesional, terstruktur, adaptif, serta berbasis sistem merit. Konsep SMART ASN (Smart, Melayani, Akuntabel, Responsif, dan Transformatif) menjadi arah pengembangan SDM ASN di masa depan agar mampu menjadi agen perubahan birokrasi. Manajemen ASN menegaskan bagaimana seluruh nilai dan sikap tersebut diinternalisasi melalui kebijakan rekrutmen, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, pemberian penghargaan, serta penerapan prinsip netralitas dan integritas. Dengan demikian, sikap bela negara dan nilai-nilai dasar ASN tidak berhenti pada individu, tetapi ditopang sistem birokrasi yang mendorong profesionalitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik berkelas dunia.

Ketiga agenda ini membentuk siklus penguatan: Agenda 1 membangun pondasi karakter dan wawasan kebangsaan, Agenda 2 mengajarkan implementasi sikap melalui perilaku kerja sehari-hari, dan Agenda 3 memastikan semua nilai tersebut dapat diinstitusikan secara berkelanjutan melalui sistem manajemen ASN yang modern, adaptif, dan meritokratik. Dengan hubungan yang saling menguatkan, ASN diharapkan mampu menjadi pelaksana kebijakan publik yang berdaya saing, pelayan masyarakat yang tanggap, sekaligus pemersatu bangsa yang menjaga keutuhan NKRI di tengah disrupsi global dan teknologi.

Pada akhirnya, keterkaitan tiga agenda ini menjadi modal penting untuk mewujudkan visi Indonesia Maju, yakni birokrasi yang lincah, inklusif, digital, transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Sinergi antara pondasi karakter, nilai perilaku kerja, dan manajemen yang terstruktur membuat ASN benar-benar siap menjadi agen transformasi birokrasi yang mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani, demi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.